



**LAPORAN KINERJA
BAPEDALITBANG
TAHUN 2017**

**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PAINAN, MARET 2018

BAB I

PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM SKPD

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan secara operasional berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural badan perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan saat ini dipimpin oleh seorang kepala badan yaitu **Yozki Wandri, S.Pi, M.Si.**

Secara umum Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tugas pokok Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Bapedalitbang dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
4. Pengevaluasian pelaksanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

II. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir terdiri dari: 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala bidang yang dilengkapi dengan sub bagian dan sub bidang. Secara rinci tugas dan

fungsi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

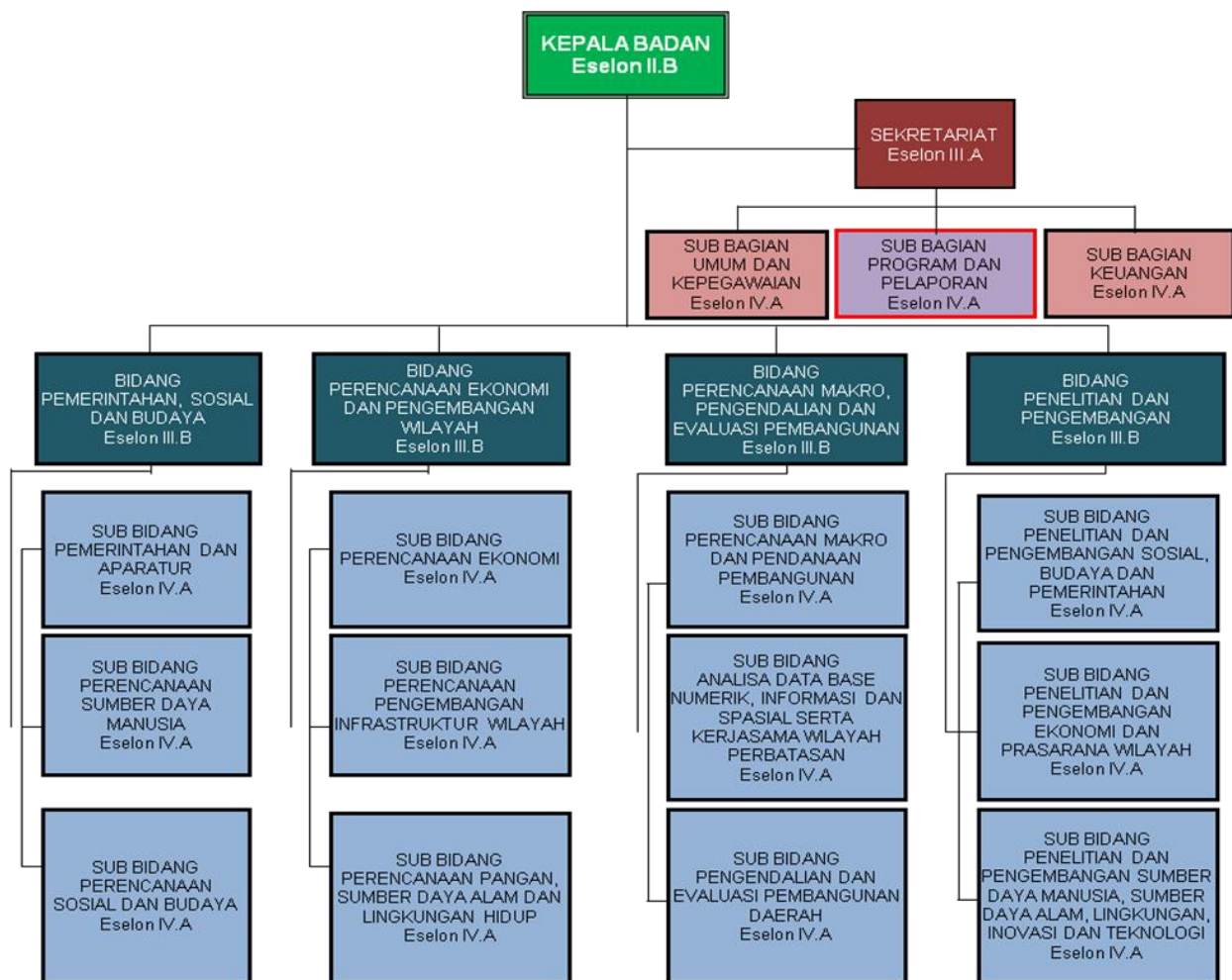
- 1) Kepala, bertugas membantu dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya
- 2) Sekretariat. Sekretariat Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Bapedalitbang di bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Penyusunan Rencana Kegiatan di lingkungan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- 3) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang didalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Insfrastruktur Wilayah, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi.
- 4) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang di dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di Bidang Sosial Budaya serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber daya Manusia, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.
- 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang di dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah, Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintah dan Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM, SDA, Lingkungan , Inovasi dan Teknologi.

6) Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bapedalitbang dalam melaksanakan Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dibantu oleh Kepala Sub Bidang pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kepala Sub Bidang Analisa Data Base Numerik, Informasi dan Spasial serta Kerjasama Wilayah Perbatasan, Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Rincian Tugas Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan.

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan



(Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36.Tahun 2016 tanggal 30 November 2016).

III. SUMBERDAYA APARATUR

Sumber daya aparatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2017 berjumlah 40 orang PNS termasuk 10 orang tenaga sukarela dengan klasifikasi sebagai berikut :

1) Berdasarkan golongan ruang

- a) Golongan IV : 9 orang
- b) Golongan III : 23 orang
- c) Golongan II : 8 orang
- d) Sukarela : 10 orang

2) Berdasarkan pendidikan

- a) Pasca Sarjana : 14 orang
- b) Sarjana Perikanan : 1 orang
- c) Sarjana Pertanian : 2 orang
- d) Sarjana Peternakan : 2 orang
- e) Sarjana Komputer : 1 orang
- f) Sarjana Hukum : 3 orang
- g) Sarjana Ilmu Sosial : 1 orang
- h) Sarjana Planologi : 2 orang
- i) Sarjana Teknik Industri : -
- j) Sarjana Teknik Sipil : 1 orang
- k) Sarjana Ekonomi : 5 orang
- l) Sarjana Administrasi Pemerintahan : 1 orang
- m) SLTA : 7 orang

3) Berdasarkan jabatan

- a) Eselon II : 1 orang
- b) Eselon III : 5 orang
- c) Eselon IV : 11 orang
- d) Tenaga administrasi : 22 orang
- e) Tenaga Sukarela : 10 orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja OPD yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang memengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan, efektifnya perencanaan strategis suatu OPD apabila rencana itu disusun secara inklusif yang berorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja OPD sekarang, bagaimana gambaran kinerja OPD masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja OPD dalam upaya mencapai gambaran kinerja OPD masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan Strategik adalah suatu proses berorientasi kepada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun untuk mencapai hasil tersebut Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabuapten Pesisir Selatan, Menetapkan perencanaan Strategis sebagai berikut:

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi

VISI : “Terwujudnya Perencanaan Daerah Yang Berkualitas dan Visioner Guna mencapai Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera

Visi merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah. Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban menyusun rencana pembangunan selalu mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang.

Berkualitas memiliki makna bahwa perencanaan yang disusun harus memiliki prinsip partisipatif, aplikatif dan terintegrasi antar sektor, antar ruang dan antar waktu. Makna visioner adalah memiliki wawasan ke depan yang selalu mengutamakan prinsip berkesinambungan.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta

produktif. Visi juga suatu gambaran atau keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi tersebut mengandung arti bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan pendekatan *bottom up planning* dengan *top down planning*.

Artinya perencanaan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat, mulai dari tingkat kampung, nagari, kecamatan dan kabupaten. Selain itu hasil aspirasi masyarakat disinkronkan dengan perencanaan yang telah disusun oleh masing – masing OPD dengan menggunakan informasi teknologi untuk efektif dan efisien pekerjaan.

Pada visi tersebut terdapat kata kunci yang dapat dijelaskan dari sudut pandang planner :

Perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang terdiri dari keputusan atau pilihan tentang alternatif cara-cara dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang.

Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Sinergis berarti proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dan disusun berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan masyarakat, *stakeholders*, pemerintah dan wakil rakyat.

Berkelanjutan maksudnya adalah perencanaan pembangunan yang dibuat merupakan usaha yang terus menerus dilakukan sampai tujuan yang diinginkan tercapai dan tidak dilakukan secara parsial.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Bapedalitbang. Rumusan misi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”**

Penjelasan Misi

1. Misi Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu : (1) reformasi birokrasi, (2) SDM yang bersih dan responsive dan (3) peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi yang dimaksud dalam misi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju aparatur yang bersih dan responsif dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang termasuk mengenai besaran anggaran pembangunan.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dimaksud dalam misi ini adalah upaya pemerintahan daerah untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti kependudukan (akta kelahiran ,KTP, KK), dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.

Capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan misi ini adalah terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi. Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting. SDM berkualitas hanya dapat terbentuk dengan kondisi kesehatan prima. Kesehatan yang prima tentunya akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berbuat lebih banyak dan lebih produktif.

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas Bapedalitbang menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi – Tujuan

Misi	Tujuan
Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
	2. Tercapainya Target Pembangunan Daerah

2.1.4 Sasaran

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya.

Tabel 2.1.
Tujuan-Sasaran-Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator
1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan peta berstandar	1. Persentase perencanaan perurusan yang sudah disertai dengan peta berstandar
	2. Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra dan Renja
2. Tercapainya target pembangunan daerah	1. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	1. persentase capaian program pembangunan
	2. Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan	1. persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM

2.1.5 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapedalitbang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat		
Tujuan I : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas		
1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis peta	1. Penguatan kapasitas SDM perencana dalam mengoperasikan aplikasi SIG 2. Optimalisasi ketersediaan data dan kualitas hasil analisis data pembangunan	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi public 2. Peningkatan verifikasi, validasi dan analisis data data serta informasi pembangunan

1. Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi prinsip pembiayaan pembangunan berbasis money follow program 2. Optimalisasi kesesuaian Perencanaan dengan Penganggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fokus pembiayaan pembangunan pada program yang bersifat Holistik, tematik, ntegratif dan spasial 2. Peningkatan pembiayaan tahunan berdasarkan prioritas pembangunan
Tujuan II : Tercapainya target rencana pembangunan daerah		
1. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah berdasarkan kinerja rencana pembangunan 2. Optimalisasi fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja evaluasi pencapaian sasaran pembangunan tahunan terhadap sasaran jangka menengah maupun jangka panjang
1. Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan esesuaian Pendanaan Renja OPD dengan Target Prioritas RKPD 2. Meningkatkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan target kegiatan Renja OPD terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sinkronisasi pendanaan APBD sesuai Prioritas RKPD 2. Peningkatan Hasil Evaluasi Renja OPD

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan telah mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta RPJMD tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan (tahun akhir Renstra)	sasaran strategis	Indikator sasaran	target kerja sasaran pada tahun ke- (%)					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas	95%	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis peta berstandar	Persentase Perencanaan per urusan yang sudah disertai dengan Peta terstandar (%)	65	75	80	90	90	95
				Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Lainnya (%)	85	90	90	95	95	95
2	Tercapainya target rencana pembangunan daerah	Persentase Capaian Program Pembangunan	95%	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	Persentase Capaian Program Pembangunan (%)	90	95	95	95	95	95
				Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan	Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM (%)	80	85	90	90	95	95

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Tahun 2017 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017. Perjanjian kinerja Pem Pemerintah Daerah tahun 2017 mengalami beberapa revisi dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET
i	(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan	1 Terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 2 Terbantunya Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	100 100
2.	Menciptakan Perencanaan yang aplikatif, terintegrasi antar berbagai program dan menjamin keberlanjutan usaha perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan	1 Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah. 2 Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	100 100
3.	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melahirkan dokumen-dokumen Perencanaan yang sesuai kebutuhan sebagai wujud dari perencanaan partisipatif. Menciptakan sistim koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan stakeholders dalam rangka menginventarisasi permasalahan untuk melahirkan konsep pembangunan yang mantap.	1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (bottom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif 1 Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan. 2 Terkoordinir dan tersedianya data untuk kepentingan penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah.	100 100

TABEL 2.4
REVISI PERJANJIAN KINERJA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016

No	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran				Target		Keterangan
	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi			
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan	1 Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis peta berstandar	1	1 Terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase Perencanaan per urusan yang sudah disertai dengan Peta terstandar (%)	30	65	perubahan karena adanya revisi Renstra dan target indikator sasaran
			2	2 Terbantunya Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.			100		perubahan karena adanya revisi Renstra dan target indikator sasaran

2	Meningkatnya Kualitas Monev dalam Pembangunan	1	Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	1	Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.	1	Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Lainnya (%)	30	85	perubahan karena adanya revisi Renstra dan target indikator sasaran
				2	Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.			100		perubahan karena adanya revisi Renstra dan target indikator sasaran
3	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melahirkan dokumen-dokumen Perencanaan yang sesuai kebutuhan sebagai wujud dari perencanaan partisipatif.	1	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (bottom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif	1	Persentase Capaian Program Pembangunan (%)	60	90	perubahan karena adanya revisi Renstra dan target indikator sasaran

4	Menciptakan sistim koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan stakeholders dalam rangka menginventarisasi permasalahan untuk melahirkan konsep pembangunan yang mantap.	1	Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan	1	Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.	1	Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM (%)	100	80	perubahan karena adanya revisi Renstra dan target indikator sasaran
				2	Terkoordinir dan tersedianya data untuk kepentingan penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah			100		perubahan karena adanya revisi Renstra dan target indikator sasaran

Berdasarkan revisi di atas, pada tabel 2.4 akan disajikan Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 yang akan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Bapedalitbang tahun 2017..

SASARAN STRATEGIS	TARGET	
(1)	(3)	
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis peta berstandar	Persentase perencanaan perurusan yang sudah disertai dengan peta	75%
Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	Keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya	90%
Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	Persentase capaian program pembangunan	95%
Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM	80%

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.059.411.180,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 760.438.354,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 133.368.500,00
4	Program Pengembangan data/informasi	Rp 187.842.772,00
5	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Rp 150.427.630,00
6	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp 2.134.523.130,00
7	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp 342.378.400,00
8	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Rp 416.513.055,00
9	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Rp 179.634.590,00
10	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 193.286.516,00
11	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Rp. 188.352.332,00

12	Program Penelitian , Pengembangan & Pemanfaatan SDM & IPTEK Daerah		Rp. 240.732.740,00
	Jumlah		Rp 5.986.909.199,00

2.4 Keberhasilan

Pada tahun 2017, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan belum berkesempatan untuk meraih penghargaan-perhargaan. Hal ini dikarenakan penghargaan dalam urusan Perencanaan Pembangunan sangat jarang.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assesment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah :

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan LKJ Tahun 2017, belum dapat dijelaskan secara baik indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) karena LKJ ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- X > 85 : Sangat Berhasil
- 70 < X < 85 : Berhasil
- 55 < X < 70 : Cukup Berhasil
- X < 55 : Tidak Berhasil

Target pencapaian kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Target Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN (%)
{1}	{1}	{2}	{3}	4	5
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis peta berstandar	1 Persentase perencanaan perurusan yang sudah disertai dengan peta	60%	60%	100.00
2	Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	1 Keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya	75%	75%	100.00
3	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	1 Persentase capaian program pembangunan	1 Apk	1 Apk	100.00
4	Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan	1 Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM	80%	80%	100.00

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2017 adalah sebagai berikut :

SASARAN. 1**MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS PETA BERSTANDAR**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase dokumen tata ruang yang ditindaklanjuti	%	60%	60%	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.1. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 1. termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

1. Persentase dokumen tata ruang yang ditindaklanjuti.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030 yang telah selesai direvisi sebanyak 1 dokumen, 1 Dokumen KLHS, 1 Dokumen Profil Daerah, 1 Dokumen GIS Pendidikan dan terlaksanannya Koordinasi BKPRD dan Forum Data . Berikut tabel Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase dokumen tata ruang yang ditindaklanjuti tahun 2015-2016 :

$$\text{Formulasi Indikator Sasaran} = \frac{\text{Persentase Realisasi}}{\text{Persentase Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.2.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase dokumen tata ruang yang ditindaklanjuti Tahun 2016-2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017
1.	Persentase dokumen tata ruang yang ditindaklanjuti	%	60	60	100	100

Indikator persentase dokumen tata ruang yang ditindaklanjuti merupakan salah satu indikator yang dilaksanakan dengan merevisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Dari tabel 3.2 menunjukkan bahwa realisasi kinerja dokumen tata ruang yang ditindaklanjuti Tahun 2016-2017 dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan Revisi RTRW (1 dokumen).
- b. KLHS RTRW (1 dokumen).
- c. Koordinasi BKPRD Kab. Pessel.
- d. Forum Data kab. Pessel.
- e. Penyusunan Buku Profil Daerah (1 dokumen).
- f. Penyusunan Database Pendidikan berbasis GIS (1 dokumen).

SASARAN. 2
MENINGKATNYA KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya	%	75%	75%	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.3. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 2. termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi pada Tahun 2017 dengan target sebanyak 6 (enam) dokumen yang meliputi Dokumen Revisi RPJMD, Dokumen RKPD, Dokumen KUA PPAS, Dokumen KUA PPAS Perubahan, Dokumen LKPJ dan Perjanjian Kinerja. Berikut tabel Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya, tahun 2015-2016 :

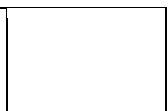
$$\text{Formulasi Indikator Sasaran} = \frac{\text{Persentase Realisasi}}{\text{Persentase Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.4.
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya Tahun 2016-2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017
1.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya	%	75	75	100	100

Indikator persentase Keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya merupakan salah satu indikator yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran strategis. Dari tabel 3.4 menunjukkan bahwa realisasi persentase Keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya Tahun 2016-2017 dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Dalam mencapai indikator kinerja persentase Keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
2. Penyusunan Rancangan RKPD
3. Penyusunan KUA - RAPBD



4. Penyusunan KUA - APBD Perubahan
5. Revisi, Evaluasi RPJMD dan Renstra OPD
6. Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

SASARAN. 3
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
PEMBANGUNAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase capaian program pembangunan	%	90	90	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.5. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 2. termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

3. Persentase Capaian program pembangunan.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planing), Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya, Koordinasi Program Sanitasi dan Perumahan dan Pemukiman, Pembentukan Dewan Riset Daerah, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Koordinasi kelitbang. Berikut tabel Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya, tahun 2015-2016 :

Formulasi Indikator Sasaran : $\frac{\text{Persentase Realisasi}}{\text{Persentase Target}} \times 100\%$

Tabel 3.6.
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Capaian Program Pembangunan
Tahun 2016-2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017
1.	Persentase capaian program pembangunan	%	90	100	90	100

Indikator persentase capaian program pembangunan merupakan salah satu indikator yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran strategis. Dari tabel 3.6 menunjukkan bahwa



realisasi persentase capaian program pembangunan Tahun 2016-2017 dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

SASARAN. 4
TERWUJUDNYA AKURASI KEPUTUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM	%	80%	80%	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.3. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 4. termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

$$\text{Formulasi Indikator Sasaran} = \frac{\text{Persentase Realisasi}}{\text{Persentase Target}} \times 100\%$$

4. Persentase Kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan, terwujudnya konsistensi perencanaan dan penganggaran melalui Evaluasi RKP, Fasilitasi dan Sinkronisasi RPJM Nagari dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Kinerja Persentase Kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran keselarasan RPJM, tahun 2015-2016 :

Tabel 3.8.
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM Tahun 2016-2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017
1.	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM	%	80	80	100	100

Indikator persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM merupakan salah satu indikator yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran strategis. Dari tabel 3.4 menunjukkan bahwa realisasi persentase Keselarasan RPJMD dengan



dokumen lainnya Tahun 2016-2017 dapat dijalankan dengan baik dan lancar, yang didukung oleh Kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan sinkronisasi RPJM Nagari
2. Evaluasi RKPD
3. Koordinasi Penyusunan LKPJ
4. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.

3.1 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bapedalitbang, tercantum pada tabel 3.9.

Tabel 3.61
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang
Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2016		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis Peta Berstandar	1.380.448.567	1.264.942.062	91,63
2	Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	759.697.236	727.917.685	95,81
3	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan.	1.604.979.262	1.399.437.933	87,19
4	Terwujudnya akurasi keputusan kebijakan pembangunan	458,293,874	403.082.265	87,95
TOTAL		4.203.418.939	3.795.379.945	90.41

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2017

Dari tabel 3.9 diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebesar Rp.5.986.909.199,- terealisasi sebesar Rp.5.546.644.556,- atau 92,65%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 7,35% atau secara absolut sebesar Rp.440.264.643,-
- b. Sisa anggaran sebesar Rp.440.264.643,- mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.



II. Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja

Target pencapaian kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Target Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN (%)
(1)	(1)	(2)	(3)	4	5
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis peta berstandar	1 Persentase perencanaan perurusan yang sudah disertai dengan peta berstandar	75%	70%	93,33
2	Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	1 Keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya	90%	90%	100,00
3	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	1 Persentase capaian program pembangunan	95%	95%	100,00
4	Terwujudnya akurasi keputusan pembangunan	1 Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJM	85%	97%	114,12

III. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Bapedalitbang tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari 4 sasaran strategis dan menentukan persentase hasil pencapaiannya.

Sasaran 1

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan berbasis peta berstandar

Pada tahun 2017 dari target indikator kinerja Bapedalitbang mengenai Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Selaras terealisasi sangat baik, hal ini dinilai dari pencapaian seluruh indikator kinerja yang nilainya 100%. Program dan kegiatan yang mendukung untuk tercapainya indikator tersebut yaitu:

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Berbasis Peta Berstandar	Persentase dokumen tata ruang yang ditindak lanjuti	dokumen	1	1	100%
	Tersusunnya Dokumen Revisi RTRW Kab. Pessel 2010-2030	dokumen	1	1	100%
	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasi	dokumen	1	1	100%
	Tersusunnya data base pendidikan berbasis GIS	Dokumen	1	1	100%
	Jumlah SDM perencana yang berkompetensi	orang	10	10	100%
	Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur di Bapedalitbang	orang	10	10	100%

Sasaran 2

Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan

Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	dokumen	7	7	100%
	tersusunnya dokumen RKPD	dokumen	1	1	100%
	tersusunnya dokumen KUA dan PPAS RAPBD	dokumen	2	2	100%
	tersusunnya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD	dokumen	2	2	100%
	tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja	Dokumen	1	1	100%
	tersusunnya dokumen Inovasi Daerah	dokumen	1	1	100%

	Jumlah aplikasi mendukung perencanaan pembangunan	aplikasi	1	1	100%
	terlaksananya aplikasi e-planing	aplikasi	1	1	100%

Sasaran strategis Bapedalitbang yang kedua adalah Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan. Untuk mencapai sasaran strategis ini, maka ditetapkanlah 2 indikator yang harus dicapai yaitu:

- Tersusunnya Tersusunnya KUA PPAS RAPBD direncanakan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen.
- Tersusunnya KUA PPAS Perubahan RAPBD direncanakan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen.
- Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan terealisasi 100 %.
- Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi terealisasi 100 %.
- Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah terealisasi 100 %.
- Terkoordinasikanya rencana percepatan pembangunan kawasan perdesaan terealisasi 100 %.
- Tersedianya kajian tentang pengembangan pangan daerah target 1 dokumen terealisasi 100 %.
- Tersusunnya perda bumd kepariwisataan target 1 perda terealisasi 100 %.
- Tersusunnya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan target 1 dokumen terealisasi 100 %.
- Persentase perencanaan pembangunan siosial budaya yang terkoordinasikan terealisasi 100 %.
- Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi terealisasi 100 %.
- Terlaksananya koordinasi aksi pencegahan korupsi terealisasi 100 %.
- Tersedianya data base kependidikan dan masterplan pendidikan target 1 dokumen terealisasi 100 %.
- Tersusunnya startegi dan kebijakan penangulangkemiskinan target 1 dokumen terealisasi 100 %.
- Tersusunnya rencana aksi daerah implementasi abs-sbk 1 dokumen terealisasi 100 %.
- Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan terealisasi 100 %.
- Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah terealisasi 100 %.
- Terkoordinasikannya perencanaan dan pelaksanaan program wismp terealisasi 100 %.
- Tersedianya database kawaan rawan bencana 1 dokumen terealisasi 100 %.



Sasaran 3

Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan

Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program kegiatan pembangunan	Persentase perencanaan pembangunan siosial budaya yang terkoordinasikan	persen	100%	100%	100%
	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	persen	100%	100%	100%
	terlaksananya koordinasi aksi pencegahan korupsi	persen	100%	100%	100%
	tersedianya data base kependidikan dan masterplan pendidikan	dokumen	1	1	100%
	tersusunya startegi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan	dokumen	1	1	100%
	tersusunya rencana aksi daerah implementasi ABS-SBK	dokumen	1	1	100%
	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	persen	100%	100%	100%
	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah	persen	100%	100%	100%
	terkoordinasikannya perencanaan dan pelaksanaan program	persen	100%	100%	100%
	Tersedianya database kawaan rawan bencana	dokumen	1	1	100%
	Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang terkoordinasikan	persen	100%	100%	100%
	terkoordinasikannya program PMSIMAS	persen	100%	100%	100%
	terkoordinasikannya program AMPL dan PPSP	persen	100%	100%	100%

Sasaran strategis Bapedalitbang yang ke tiga adalah Terwujudnya fungsi kelitbangan yang implementatif bagi perencanaan. Untuk mencapai sasaran ini, pada tahun 2017 dilaksanakan 5 (lima) kegiatan dan terealisasi sebesar 100% dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti target 5 kali kerjasama terealisasi 100 %.
- Terkoordinasikannya kerjasaman pembangunan dengan pihak ketiga 5 kali kerjasama terealisasi 100 %.
- Jumlah SDM perencana yang berkompetensi yang ditargetkan sebanyak 50 orang dan terealisasi 100%.
- Terlaksananya peningkatan SDM aparatur Bapedalitbang ditargetkan sebanyak 15 orang yang terealisasi 100%
- Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang terkoordinasikan terealisasi 100 %.
- Terkoordinasikannya program pmsimas terealisasi 100 %.
- Terkoordinasikannya program ampl dan ppsp terealisasi 100 %.



Sasaran 4
Terwujudnya akurasi keputusan kebijakan pembangunan

Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya akurasi keputusan kebijakan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	dokumen	3	3	100%
	Tersusunya laporan LKPj kepala daerah	dokumen	1	1	100%
	terlaksananya monitoring pelaksanaan rencana pembangunan	dokumen	1	1	100%
	Tingkat integrasi data pembangunan	persen	100%	100%	100%
	terlaksananya koordinasi updating data sektoral daerah	persen	100%	100%	100%
	tersosialisasinya program-program pembangunan	persen	100%	100%	100%
	tersedianya data statistik daerah	dokumen	1	1	100%

- Tersusunya laporan LKPj kepala daerah sebanyak 1 dokumen yang telah tersealisasi sebesar 100%
- terlaksananya monitoring pelaksanaan rencana pembangunan sebanyak 1 dokumen yang telah tersealisasi sebesar 100%
- Tersusunya perjanjian Kinerja sebanyak 1 dokumen yang telah tersealisasi sebesar 100%
- Tingkat integrasi data pembangunan sebanyak 3 dokumen yang telah tersealisasi sebesar 100%
- Terlaksananya koordinasi updating data sektoral daerah yang tersealisasi sebesar 100%
- Tersosialisasinya program-program pembangunan yang tersealisasi sebesar 100%
- Tersedianya data statistik daerah sebanyak 1 dokumen yang telah tersealisasi sebesar 100%
- Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan yang tersealisasi sebesar 100%

IV. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui dana APBD sebesar Rp. 4.033.691.165 dan terealisasi sebesar Rp. 3.709.982.695 atau 91.97% seperti rincian berikut :

SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang selaras	1.336.268.605	1.267.317.145	94,84
Meningkatnya Kualitas Monev dalam Pembangunan	2.313.628.006	2.254.630.492	97,45
Terwujudnya fungsi kelitbangan yang implementatif bagi perencanaan daerah	690.774.957	251.285.010	99,41

Capaian realisasi keuangan secara keseluruhan yang mencapai angka 93,80. Sementara itu terdapat capaian realisasi keuangan yang rendah yaitu pada sasaran strategis ketiga yaitu Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Menentukan Arah Pembangunan Daerah yang mencapai 89,71%. Hal ini disebabkan karena kegiatan Background Study RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dilaksanakan pada anggaran perubahan.



BAB IV PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2017, Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 sebagai cerminan dari hasil kinerja Bapedalitbang selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian.

Pengukuran kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, mencakup penilaian tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari eselon 2, eselon 3 dan eselon 4.

Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator semuanya tercapai sesuai yang diharapkan atau sesuai target. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam pencapaian indikator kinerja selama tahun 2017, tidak ditemui kendala yang berarti, tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planing) yang aplikasinya diintegrasikan dengan SIPKD masih belum berjalan sempurna akibatnya integrasi yang diharapkan dalam aplikasi program kurang optimal .
2. Kegiatan Evaluasi RKPD dalam pengumpulan usulan program/kegiatan dari OPD sering tidak tepat waktu sehingga menyulitkan dalam rekapitulasi RKPD.

Upaya yang akan dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut yaitu :

1. Penyempurnaan aplikasi e-planing dan SIPKD pada tahun 2018.
2. Pembuatan aplikasi RKPD pada tahun 2018.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bapedalitbang pada tahun-tahun berikutnya.

Palnan, Maret 2018
Kepala Bapedalitbang

